



**Pemerintah  
Kota Makassar**

**2023**



# LAPORAN EVALUASI RENJA 2023



**Dinas Pertanahan Kota Makassar**



Jalan Jenderal Achmad Yani No.2 Makassar  
(Gedung Balai Kota Lt. 7)



@dinasptanahanmakassar (Instagram)

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kami ucapkan ke Hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia Nya sehingga penyusunan Evaluasi Renja Dinas Pertanahan Kota Makassar Tahun 2023 telah diselesaikan.

Penyusunan Evaluasi Renja Dinas Pertanahan disusun dalam rangka mengukur sejauh mana capaian kinerja dan realisasi anggaran dari pelaksanaan program dan kegiatan yang terdapat dalam dokumen Renja SKPD Tahun 2023. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk penyusunan rencana pembangunan selanjutnya.

Demikian Evaluasi Renja Dinas Pertanahan Tahun 2023 ini dibuat untuk menjadi bahan seperlunya

**Kepala Dinas,**

**Dra. Hj. Sri. Sulsilawati, M.Si**

Pangkat / Gol : Pembina Utama Muda , IV/c

Nip : 19670103 198603 2 002

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM .....	1
B. PROGRAM .....	1
C. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN.....	1
E. KELOMPOK SASARAN.....	6
<b>BAB II. PERBANDINGAN ANTARA PROGRAM/KEGIATAN DALAM RENJA DINAS PERTANAHAN DAN RENSTRA</b> .....	7
<b>BAB III. CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA PROGRAM/ KEGIATAN RENJA SKPD TAHUN 2021</b>	
A. CAPAIAN TARGET KINERJA ORGANISASI.....	21
<b>BAB IV. KENDALA YANG DIHADAPI</b> .....	42
<b>BAB.V PENUTUP</b>	
A. KESIMPULAN.....	45
C. REKOMENDASI.....	46
<i>Lampiran-Lampiran</i>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan merupakan proses dinamis yang disesuaikan dengan perkembangan permasalahan dan isu strategis terkini. Perkembangan dan dinamika kondisi perekonomian maupun adanya kebijakan nasional yang membutuhkan penyesuaian, menyebabkan perencanaan pembangunan perlu untuk dilakukan penyesuaian.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2023 telah disusun dengan memperhatikan keterkaitan, sinergi dan konsistensi dengan dokumen perencanaan Provinsi maupun Nasional. Rumusan sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam RKPD dirancang untuk menjawab permasalahan yang dihadapi dengan berdasarkan analisis data dan asumsi-asumsi pada saat dokumen perencanaan disusun. Semua program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang direncanakan diharapkan dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Namun demikian kondisi saat pelaksanaan rencana ternyata terdapat hal-hal yang berbeda dengan asumsi yang telah disusun, sehingga mengharuskan adanya penyesuaian dan perubahan rencana maupun target untuk menjamin terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan Kota Makassar yang akan dicapai pada tahun 2023. Penyusunan perubahan RKPD Kota Makassar Tahun 2023 juga memperhatikan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan pada periode tahun 2023 sehingga ditarget dan capaian diharapkan selaras terhadap sasaran Pemerintah Kota Makassar.

### **B. Landasan Hukum**

Dasar hukum untuk menyusun Perubahan RKPD Kota Makassar Tahun 2023 antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);

15. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 22);
16. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 24);
17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006, Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2015 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 5);

### **C. Tujuan dan Sasaran**

Penyusunan Laporan Evaluasi RENJA Dinas Pertanahan Kota Makassar Tahun 2023 dimaksudkan untuk mengukur pencapaian kinerja program dan kegiatan hingga akhir tahun perencanaan Triwulan keempat tahun 2023.

Adapun sasaran penyusunan evaluasi Renja Dinas Pertanahan tahun 2023 adalah :

- Mengukur capaian kinerja program dan kegiatan
- Mengukur capaian realisasi anggaran program dan kegiatan
- Menganalisa kendala pelaksanaan program dan kegiatan untuk menemukan tindak lanjut/solusi yang bisa diterapkan.

### **D. Program**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat sguna mencapai sasaran tertentu.

Program dan kegiatan Dinas Pertanahan tahun 2023 terdiri dari 1 program pendukung dan 4 program utama. Adapun program tersebut sebagai berikut :

#### **Program Pendukung :**

1. Program Penunjang urusan pemerintahan Daerah

### 3 Program Utama

1. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
2. program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan
3. Program Penatagunaan Tanah

#### E. INDIKATOR KINERJA

Dinas Pertanahan Kota Makassar mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- Perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang pertanahan;
- Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang pertanahan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang pertanahan;
- Pelaksanaan Administrasi dinas Urusan Pemerintahan bidang pertanahan;
- Pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan bidang pertanahan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan tersebut dirumuskan beberapa program dengan indikator kinerja sasaran dari program dan kegiatan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1  
Indikator Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Indikator
A	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik
		Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah
		Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas
1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang di susun
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen, Renja, Renja Perubahan, SOP Yang disusun
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA pokok yang tersedia
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan RKA - SKPD yang tersedia

	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA pokok SKPD yang tersedia
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan SKPD yang tersedia
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD yang tersedia
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi Renja yang tersedia
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan Administrasi Keuangan yang tersusun</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan
	Penyediaan administrasi pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah administrasi pelaksana tugas ASN yang dilaksanakan
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan dan verifikasi keuangan skpd yang dilaksanakan
	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi	Jumlah koordinasi dan akuntansi SKPD yang dilaksanakan
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersedia
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan dan semesteran yang disusun
3	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada perangkat Daerah</b>	Jumlah administrasi barang milik daerah yang dilaksanakan
	Penatausahaan Barang milik daerah pada SKPD	Jumlah penatausahaan Barang Milik daerah yang dilaksanakan
	Pemanfaatan barang milik daerah SKPD	Jumlah pemanfaatan barang milik daerah yang dikelola
4	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah yang tersedia</b>
	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah peserta sosialisasi Tata Cara pelepasan Ex- Gemente



	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah orang yang mendapatkan informasi terkait peraturan/ kebijakan retribusi/ sewa
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah lokasi tanah aset pemerintah Kota Makassar sebagai obyek retribusi yang di data
5	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Disusun</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian dinas yang diadakan
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang disusun
	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Monitoring, evaluasi kinerja pegawai yang dilaksanakan
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
6	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Administrasi Umum Perangkat daerah yang disediakan</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen listrik yang disediakan
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik yang disediakan
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan
	Penyeleraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yg dilaksanakan
	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah sistem pemerintah berbasis elektronik yang tersedia
7	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang diadakan</b>
	Pengadaan Peralatan mesin lainnya	Jumlah peralatan mesin kantor yang diadakan
8	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat dan ekspedisi yang disediakan
	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jaskomunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan

9	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas jabatan yang disediakan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional yang disediakan
	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara
	Pemeliharaan aset tetap Lainnya	Jumlah/ Pagar papan bicara yang terpelihara
	Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dn bangunan lainnya	Jumlah Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor yang terlaksana
B	<b>Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan</b>	<b>Persentase sengketa tanah yang dilakukan dengan mediasi</b>
	Inventarisasi sengketa, konflik dan perkara dalam satu daerah kabupaten/ Kota	Jumlah mediasi sengketa tanah yang dilaksanakan
	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan di Kota Makassar yang dilaksanakan
C	<b>Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan</b>	<b>Persentase Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Yang diselesaikan</b>
	<b>Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah koordinasi ganti kerugian tanah yang dilaksanakan</b>
	Penetapan daftar masyarakat penerima santunan tanah dalam satu daerah kabupaten kota	Jumlah daftar sementara masyarakat/ objek pengadaan tanaha yang dikeluarkan tim persiapan
	Koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pmbangunan oleh pemerintah kabupaten kota	Jumlah koordinasi ganti kerugian tanah kepada masyarakat untuk kepentingan pemerintah pemerintah daerah kab/ Kota
D	<b>Program Penatagunaan Tanah</b>	<b>Persentase Aset Tanah Pemerintah Kota Yang tersertifikat</b>

	<b>Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah tanah asset pemerinth kota yang diamankan</b>
	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan Tanah	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah yang dilaksanakan
	Koordinasi Pemetaan zona nilai tanah kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sertifikat yang diterbitkan
	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah kabupaten kota	Jumlah pengamanan fisik terhadap asset tanah pemerintah kota

## F. KELOMPOK SASARAN

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi, dalam bentuk terakhir dan akan dapat dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tahunan, semesteran, atau bulanan. Sasaran juga menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Adapun strategi yang akan mendukung pencapaian target sasaran adalah :

1. Terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan
2. Meningkatkan kinerja pelayanan untuk mendukung tugas bidang teknis dalam bentuk pelayanan administrasi
3. Meningkatkan kinerja pelayanan untuk mendukung tugas bidang teknis dalam bentuk sarana dan prasarana aparatur
4. Meningkatkan disiplin aparatur
5. Meningkatkan kinerja pelayanan untuk mendukung tugas bidang teknis
6. Meningkatkan kinerja pelayanan untuk mendukung tugas bidang teknis dalam bentuk sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

## **BAB II**

### **PERBANDINGAN ANTARA PROGRAM /KEGIATAN PADA RENJA DAN RENSTRA SKPD**

Renstra Dinas Pertanahan periode tahun 2021 sampai dengan 2026 memuat kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2021 - 2026. Pada tahun 2023 dilakukan penyusunan Renstra Dinas Pertanahan yang mengacu pada RPJMD Kota Makassar dengan periode perencanaan Tahun 2023 sampai dengan 2026 yang kemudian di sahkan setelah pengesahan RPJMD dimana Renstra SKPD memuat target perencanaan program dan kegiatan mulai pada tahun 2023 hingga 2026.

perbandingan program dan kegiatan pada Renja Dinas Pertanahan akan mengacu pada Renstra Tahun 2022-2026. Renstra sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun atau disebut dengan Rencana Strategis yang merupakan tolak ukur pengendalian dan evaluasi capaian kinerja SKPD dalam melaksanakan misi, mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan strategi, kebijakan program, kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

Dari hasil analisa data, diketahui bahwa target dan anggaran pada Renstra Dinas Pertanahan yang telah terjabarkan dan memiliki kesesuaian dengan Renja Pokok Dinas Pertanahan tahun 2023.

Adapun tabel perbandingan anantara program dan kegiatan pada Renja Dinas Pertanahan dengan RKPD Kota Makassar sebagaimana pada tabel berikut :



2	10	1	1			<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	9	124.256.375	9	124.256.375
2	10	1	2	01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah yang di susun	2	dokumen	2	53.111.000	2	53.111.000
2	10	1	2	01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA pokok yang disusun	1	dokumen	1	16.089.679	1	16.089.679
2	10	1	2	01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan SKPD yang disusun	1	dokumen	1	12.281.850	1	12.281.850
2	10	1	2	01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA pokok SKPD yang disusun	1	dokumen	1	12.723.900	1	12.723.900
2	10	1	2	01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan SKPD yang disusun	1	dokumen	1	13.802.250	1	13.802.250
2	10	1	2	01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan realisasi	1	dokumen	1	11.340.000	1	11.340.000

					Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	kinerja SKPD yang disusun						
2	10	1	2	01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun	1	dokumen	1	4.907.700	1	4.907.700
2	10	1	2	02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	12	Bulan	12	4.106.176.384	12	4.106.176.384
2	10	1	2	02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan	12	Bulan	12	3.663.969.934	12	3.663.969.934
2	10	1	2	02.02	Penyedia administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah administrasi pelaksanaan tugas ASN yang tersedia	12	Bulan	12	130.021.500	12	130.021.500
2	10	1	2	02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD yang dilaksanakan	12	Bulan	12	94.500.000	12	94.500.000
2	10	1	2	02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD yang dilaksanakan	12	Bulan	12	5.588.100	12	5.588.100
2	10	1	2	02.05	Koordinasi dan penyusunan Laporan	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan	12	Bulan	12	2.096.850	12	2.096.850

					keuangan akhir tahun SKPD	dan smesteran yang disusun						
2	10	1	2	02.07	Koordinasi dan penyusunan Laporan keuangan Bulanan/ triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan dan semesteran yang disusun	12	Bulan	12	210.000.000	12	210.000.000
2	10	1	2	03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah</b>	<b>Jumlah administrasi barang milik daerah yang tersedia</b>	12	Bulan	300	542.000.000	300	542.000.000
2	10	1	2	03.06	Penatausahaan Barang milik daerah pada SKPD	Jumlah penatausahaan Barang Milik daerah yang dilaksanakan	1	Laporan	300	300.000.000	300	300.000.000
2	10	1	2	03.07	Pemanfaatan Barang milik daerah	Jumlah pemanfaatan Barang Milik daerah SKPD	12	Perjanjian	6	242.00.000	6	529.058.400
2	10	1	2	04	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Administrasi Pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah</b>	30%	Persen	50%	346.547.820	50%	346.547.820



2	10	1	2	04.02	Analisa dan pengembangan Retribusi Daerah, serta penyusunan kebijakan retribusi daerah	Jumlah Analisa dan kebijakan Retribusi daerah yang disusun	0	Kebijakan	0	0	0	0
2	10	1	2	04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan kebijakan Retribusi daerah	Jumlah penyeberluasan kebijakan retribusi daerah yang dilaksanakan	45	Orang	320	150.000.000	320	150.000.000
2	10	1	2	04.04	Pendataan dan pendaftaran objek retribusi daerah	Jumlah objek retribusi daerah yang didata	12	Titik	60	196.547.820	60	196.547.820
2	10	1	2	05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	90%	persen	12	111.836.550	12	111.836.550
2	10	1	2	05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah kebutuhan pakaian dinas yang terpenuhi	50	stel	48	34.440.000	48	34.440.000
2	10	1	2	05.03	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang disusun	4	dok	1	15.241.800	1	15.241.800

2	10	1	2	05.05	Monitoring, evaluasi dan penilaian kerja pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah monitoring dan evaluasi penilaian kinerja pegawai yang disusun	12	Bulan	12	38.529.750	12	38.529.750
2	10	1	2	05.09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	10	Orang	5	23.625.000	5	23.625.000
2	10	1	2	06	<b>Administrasi Umum perangkat daerah</b>	Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang disediakan	90 %	Persen	42	654.904.244	42	654.904.244
2	10	1	2	06.01	Penyedia komponen instalasi Listrik/ penerangan Bangunan kantor	Jumlah komponen Listrik yang disediakan	6	jenis	6	3.270.750	6	3.270.750
2	10	1	2	06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	10	jenis	5	2.936.456	5	2.936.456
2	10	1	2	06.04	Penyedia bahan logistik kantor	Jumlah unit logistik yang disediakan	10	jenis	10	20.680.538	10	20.680.538
2	10	1	2	06.05	Penyedia barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4	jenis	4	28.318.550	4	28.318.550

2	10	1	2	06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	3	jenis	3	7.938.000	3	7.938.000
2	10	1	2	06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dilaksanakan	13	kali	13	580.000.000	13	580.000.000
2	10	1	2	06.11	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	0	Website SKPD	1	11.760.000	1	11.760.000
2	10	1	2	07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah barang penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	1	Unit	3	50.000.000	3	50.000.000
2	10	1	2	07.2	Pengadaan kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan	0	0	0	0	0	0
2	10	1	2	07.05	Pengadaan Meubel	Jumlah meubel yang diadakan	0	0	0	0	0	0
2	10	1	2	07.06	Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	1	unit	3	50.000.000	3	50.000.000

2	10	1	2	07.09	Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Yang Diadakan	0	0	0	0	0	0
2	10	1	2	07.10	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	0	0	0	0	0	0
2	10	1	2	08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia</b>	12	Bulan	12	38.323.000	12	38.323.000
2	10	1	2	08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat dan ekspedisi yang disediakan	12	Bulan	12	17.323.000	12	17.323.000
2	10	1	2	08.02	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi yang tersedia	12	bulan	12	21.000.000	12	21.000.000
2	10	1	2	09	<b>Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Pemeliharaan barang milik daerah yang tersedia</b>	17	Unit	68	407.091.200	68	407.091.200

2	10	1	2	09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Pemeliharaan, dan perizinan kendaraan dinas jabatan yang di sediakan	1	Unit	1	56.091.200	1	56.091.200
2	10	1	2	09.02	Penyedia jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional yang disediakan	10	Unit	10	150.000.000	10	150.000.000
2	10	1	2	09.04	Pemeliharaan meubel	Jumlah meubel kantor yang terpelihara	0	Buah	15	8.000.000	0	8.000.000
2	10	1	2	09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah alat kantor yang terpelihara	6	unit	22	30.000.000	22	30.000.000
2	10	1	2	09.04	Pemeliharaan aset tetap lainnya	Jumlah pagar, patok dan papan bicara yang terpelihara	20	buah	20	163.000.000	20	163.000.000
2	10	1	2	09.06	Pemeliharaan/ rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang di rehabilitasi/ terpelihara	0	-	0	-	0	0

2	10	1	2	09.07	<b>PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI</b>	<b>PERSENTASE PEMANFAATAN TANAH YANG SESUAI DENGAN PERUNTUKAN TANAHNYA DIATAS IZIN LOKASI DIBANDINGKAN DENGAN LUAS IJIN LOKASI YANG DITERBITKAN</b>	3	Lokasi	3	20.034.000	3	20.034.000
2	10	1	2	09.09	<b>Pemberian ijin lokasi dalam satu daerah Kabupaten Kota</b>	<b>Jumlah rekomendasi izin lokasi dalam satu daerah kabupaten kota</b>	3	koordinasi	3	20.034.000	3	20.034.000
2	10	02			Koordinasi dan sinkronisasi pemberian izin lokasi dalam rangka penanaman modal dan kemudahan berusaha	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemberian izin lokasi yang dilaksanakan	3	koordinasi	3	20.034.000	3	20.034.000
2	10	02	01		<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA</b>	<b>Persentase sengketa tanah</b>	100	Persen	100%	103.000.000	100%	103.000.000

					<b>TANAH GARAPAN</b>	<b>yang difasilitasi melalui mediasi</b>						
2	10	02	2	01.01	<b>Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten/ kota</b>	<b>Jumlah mediasi sengketa tanah yang dilaksanakan</b>	12	Mediasi	12	103.000.000	12	103.000.000
2	10	04			Inventarisasi sengketa , konflik, dan perkara dalam satu daerah kabupaten/ Kota	Jumlah lokasi sengketa, konflik, dan perkara yang ditinjau dan diinventarisir	12	mediasi	12	53.000.000	12	53.000.000
2	10	04	2	01	Mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam satu daerah Kabupaten/ kota	Jumlah mediasi sengketa tanah yang dilaksanakan	12	mediasi	12	50.000.000	12	50.000.000
2	10	05			<b>PROGRAM PENEYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>	<b>Persentase Ganti kerugian dan santunan Tanah untuk pembangunan yang diselesaikan</b>	5	Lokasi	5	226.664.000	5	226.664.000

2	10	05	2	01	<b>Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah Koordinasi Ganti kerugian tanah yang dilaksanakan</b>	5	lokasi	5	226.664.000	5	226.664.000
2	10	05	01	01	Penetapan daftar masyarakat penerima santunan taah dalam satu daerah kabupaten kota	Jumlah rekomendasi penetapan lokasi yang dikeluarkan	24%	persen	24%	62.000.000	24%	62.000.000
2	10	05	2.1	2	Koordinasi dan Sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koordinasi ganti kerugian tanah kepada masyarakat untuk kepentingan pemerintah daerah Kab/ Kota	5	Lokasi	5	164.664.000	5	164.664.000
2	10	10			<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	<b>PERSENTASE ASET TANAH PEMERINTAH KOTA YANG DIAMANKAN MELALUI PENGAMANAN FISIK</b>	37	Persen	37	3.697.747.950	37	3.697.747.950



						<b>PERSENTASE ASET TANAH PEMERINTAH KOTA YANG TERSERTIFIKAT</b>	32	Persen	32	1.292.865.477	32	1.292.865.477
2	10	10	2	01	<b>Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah tanah asset pemerintah kota yang diamankan</b>	<b>37%</b>	<b>Persen</b>	<b>37%</b>	<b>4.990.613.427</b>	<b>37%</b>	<b>4.990.613.427</b>
2	10	10	2	01.01	Koordinasi Sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah yang dilaksanakan	12	Kali	12	131.593.350	32 %	1.161.272.127
2	10	10	2	01.02	Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Setrifikat yang terbit	32%	Persen	32%	1.161.272.127	32 %	1.161.272.127
2	10	10	2	01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah pengamanan fisik terhadap asset tanah pemerintah yang dilaksanakan	37%	Persen	37%	3.697.747.950	37%	3.697.747.950

**BAB III**  
**CAPAIAN TARGET KINERJA DAN**  
**PENYERAPAN DANA PROGRAM/KEGIATAN RENJA SKPD**  
**TAHUN 2022**

**A. CAPAIAN TARGET KINERJA**

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Indikator dan capaian program penunjang urusan pemerintahan daerah adalah:

- Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik
- Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah
- Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas

Total anggaran pada semester II tahun 2023 adalah Rp. 12.972.301.000,- dengan realisasi Rp. 3.862.811.564,- atau 29,77 % Untuk mencapai kinerja outcome dari program ini dilaksanakan beberapa kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana di dalam tabel berikut :

Tabel 3.1

Capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
 (Indikator Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah)

Urusan/Bidang Urusan pemerintaah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> ) / Kegiatan ( <i>output</i> )	Satuan Kinerja	Target Kinerja
1	2	3	4
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	<i>Persen</i>	<b>90</b>
Kegiatan: Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	9
Kegiatan : Administrasi Keuangan perangkat daerah	Jumlah administrasi keuangan yang terlaksana	Laporan	12

Tabel 3.2  
 Capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
 (Indikator persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik)

Urusan/Bidang Urusan pemerintaah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> ) / Kegiatan ( <i>output</i> )	Satuan Kinerja	Target Kinerja
1	2	3	4
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	<b><i>Persen</i></b>	<b>90 %</b>
Kegiatan: Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah Administrasi Barang milik daerah yang dilaksanakan	persen	300
Kegiatan: Administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Jumlah administrasi Barang Milik daerah	orang	300
Kegiatan: Administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Jumlah Administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah yang terlaksana	orang	90
Kegiatan: Administrasi Umum perangkat daerah	Jumlah Administrasi umum perangkat daerah yang disediakan	laporan	100
Kegiatan: Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Unit	3
Kegiatan: Penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	Bulan	12
Kegiatan: Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah yang terlaksana	unit	42

Tabel 3.3  
 Capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
 (Indikator Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas)

Urusan/Bidang Urusan pemerintaah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> ) / Kegiatan ( <i>output</i> )	Satuan Kinerja	Target Kinerja
1	2	3	4
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	<i>Persen</i>	<b>90%</b>
Kegiatan: Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Administrasi kepegawaian perangkat daerah yang di susun	orang	90

## 2. Program Penyelesaian Sengketa tanah Garapan

Pada program penyelesaian sengketa tanah Garapan dilaksanakan kegiatan mediasi sengketa tanah dengan indikator kinerja program adalah Persentase Penanganan Sengketa Tanah Garapan Yang Dilakukan Melalui Mediasi, dihitung dengan cara :

$$\frac{\text{Jumlah sengketa yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan sengketa}} \times 100\%$$

Pada tahun 2023 sampai dengan Triwulan II, Dinas Pertanahan telah melaksanakan 12 mediasi terhadap 9 permohonan mediasi yang masuk. Sehingga capaian program adalah %

$$\frac{12}{12} \times 100\% = 75\%$$

Realisasi anggaran program penyelesaian sengketa tanah garapan adalah Rp.8.670.000 dari pagu anggaran senilai Rp.211.217.900 atau sebesar 4,10%.

Adapun Data Penyelesaian Sengketa tanah yang telah dimediasi di tahun 2023 sebagai berikut :

## Tabel Penyelesaian Konflik

NO	TANGGAL	MASALAH	REKOMENDASI	LOKASI	PROGRES	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kamis, Tgl 09 Maret 2023	Membahas masalah tanah dan identifikasi status Hak atas tanah Perumahan Rajawali, dimana tanah tersebut oleh pihak Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah diakui sebagai aset Pemerintah Kota Makassar.			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agar tidak terjadi Konflik di kemudian hari atas tanah Perumahan Rajawali sebaiknya Bidang aset mengkroscek kembali bukti penyerahan dari pemerintah Kota Madya ke para pejabat sebagai penerima tanah yang dikuasai</li> <li>2. Tanah Perumahan Rajawali tidak terdaftar pada SK Kemendagri Tahun 1983 No. 593-3-192/26 April Tahun 1983 tentang Pengesahan Pelepasan tanah yang dikuasai Pemerintah Kota Madya Daerah Tingkat II Makassar, maka tanah tersebut tidak termasuk tanah Ex Gemente.</li> </ol>	Akan dilaksanakan pertemuan selanjutnya
2.	Senin, 27 Maret 2023,	Rapat Koordinasi Pengangan Masalah Barang Milik Daerah Tanah Perumahan Rajawali terletak di Jalan Rajawali Kel. Lette, Kec. Mariso Kota Makassar.	1. Tindak lanjut dari rapat BPKAD Kota Makassar Tanggal 09 Maret 2023.	Perumahan PEMDA Rajawali Kel. Lette Kec Mariso	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bidang aset tidak memiliki bukti Penyerahan jalan tanah Perumahan Rajawali;</li> <li>2. Lahan tersebut telah dikuasai oleh pihak lain;</li> <li>3. Agar tidak terjadi konflik maka Bidang aset harus mengkroscek bukti penyerahan;</li> <li>4. Tanah Perumahan Rajawali tidak terdaftar pada Kemendagri tahun 1983 No. 593-3-193/ 26 April, Tahun 1993 tentang Penegasan pelepasan tanah yang dikuasai Pemerintah Kota Madya Daerah Tingkat II Makassar.</li> </ol>	Akan dilaksanakan pertemuanselanjutnya.
	Kamis 30 Maret 2023.	<p>Membahas Penyerobotan/ Pengrusakan aset berupa Fasum Fasos Milik Pemerintah kota Makassar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada 19 Unit Lapak pedagang yang berada dilokasi tersebut tanpa izin membangun diatas lahan dimana lahan tersebut merupakan Fasum fasos;</li> <li>• Ada beberapa fasum fasos yang sebelumnya berada dilokasi tersebut tapi sudah tidak ada di tempat tersebut seperti: Posyandu, Taman, Tiang, Toilet, dan PAUD dan semua ini diharapkan pengembalian fungsi lahan;</li> </ul>			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pihak Pemerintah Kota akan melakukan somasi terhadap para pedagang yang berada dilahan tersebut dikarenakan mereka tidak memiliki izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar terkait pembangunan 19 unik lapak pedagang disana;</li> <li>2. Menyarankan pihak Kelurahan atau Kecamatan melakukan Somasi dan Tim Kuasa Hukum Pemerintah kota Makassar;</li> <li>3. Tim Kuasa Hukum meminta Bahan data- data dan berkas yang dibutuhkan seperti foto lokasi sebelum dan sesudah ada beberapa lapak pedagang.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dilakukan penegakan Perd;</li> <li>• Membuat somasi kepada pemilik 19 unit lapak yang berada di fasum fasos Milik Pemerintah Kota Makassar.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Bahwa terjadi Jual Beli dan terbit Akta Jual Beli An. Ibu Rabiah dan yang bersangkutan juga memiliki Rinci.</li> </ul>				
3	Jumat, 31 Maret 2023,	<p>Membahas permasalahan PT.IKI yang dijadikan Fasum oleh pemerintah Kota Makassar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PT. IKI pada saat mengajukan perpanjangan HGB dan dilakukan pengukuran ulang oleh BPN Kota Makassar ternyata Luasan Tanah Milik PT.IKI berkurang sehingga perpanjangan HGB PT.IKI Terhambat;</li> <li>Lahan tersebut telah dijadikan jalan oleh Pemerintah Kota Makassar(fasum fasos) atas dasar Musreimbang.</li> </ul>		PT. INDUSTRI KAPAL INDONESIA PERSERO (PT.IKI)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dilakukan peninjauan setempat untuk melihat secara langsung objek permasalahan;</li> <li>Melihat daftar aset Pemerintah Kota Makassar.</li> <li>BPN Kota Makassar akan melakukan Pengukuran ulang kembali untuk pengembalian batas.</li> </ol>	Melakukan peninjauan setempat untuk melihat langsung Objek Permasalahan.
4		Rapat, Senin 3 April 2023, Tentang membahas tindak lanjut hasil rapat Tanggal 27 Maret Perihal, Rapat Koordinasi Pengangan masalah penanganan masalah Milik Daerah Tanah perumahan Rajawali terletak di jalan Rajawali II Kel. Lette Kec. Mariso Kota Makassar.	1.	2.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Jumlah rumah keseluruhan : 20 rumah;</li> <li>Jumlah rumah yang bersertipikat ; 9 rumah;</li> <li>Jumlah rumah yang dalam proses pengajuan di Kantor ATR/ BPN Kota Makassar;</li> <li>Luas keseluruhan lahan adalah ; 1.115M2;</li> <li>Menunggu hasil pengecekan dan Verifikasi dari BPN Kota Makassar terhadap pengecekan 9 SHM dan 2 proses pengajuan; peningkatan Hak pada kantor Pertanahan Kota Makassar</li> <li>Diharapkan kepada unsur Kecamatan, Kelurahan, RT/RW untuk tetap melakukan Pendataan terhadap 7 rumah yang belum diketahui identitasnya.</li> </ol>	Menunggu tindak lanjut dari Bidang asset.
5	Senin 6 April 2023,	Membicarakan surat Permohonan Sdr. H. Abd. Wahid, terkait Penjelasan tentang Fasilitas umum jalan umum masuk ke pergudangan Tamalanrea Kota Makassar.	Surat permohonan sdr H. Abdul Wahid PM, tanggal 20 Maret 2023.	Fasum Jalan Masuk Pergudangan Tamalanrea Makassar Kel. Parang Loe Kec. Biringkanaya Makassar.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Akan dibentuk Tim dari berbagai OPD terkait;</li> <li>Akan dilakukan peninjauan lapangan;</li> <li>Menunggu hasil kejelasan status objek tanah jalan masuk ke kawasan pergudangan Tamalanrea dari pihak ATR/BPN Kota Makassar terkait 2 SHM yaitu; SHM No. 20590/ Parangloe dan SHM No. 20592/ Parangloe.</li> </ol>	Proses berlanjut ke Dinas Perumahan dan Bidang aset serta Bagian Hukum.

6	Senin 29 Mei 2023	<p>Membahas permasalahan Perjanjian Kerjasama antara pemerintah Kota Makassar dan PT. Kalla Inti Karsa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Di Tgl 1 September 2014 ada nota Kesepahaman bersama antara Pemerintah Kota Makassar dengan PT. KIK tentang Kesepakatan Pemutusan Perjanjian Kerja sama bersyarat Kontrak bagi tempat usaha dalam rangka pembangunan terminal Regional yang terletak di jalan kapasa raya, Kelurahan Daya Kecamatan Biringkalanaya Kotamadya daerah Tingkat II Ujung pandang., melalui LSM yang milik pengusaha yang ada di terminal Daya, telah melakukan kerja sama sampai dengan Tahun 2035. Di kios itu ada yang memilki HGB dan juga telah membayar sebesar 45 juta, sampai 114 juta, di loket 2 pembayaran sampai 37an juta, loket dalam, 37 juta kios dalam, 33 juta kios tengah, kios Lontara 6,8 juta, ini dibuktikan dengan SHG dengan batas akhir 19 januari 2035 yang dimiliki para penggunaan bangunan tempat usaha Regional Daya;</li> <li>• Dalam jangka waktu 6 bulan sejak di tanda tangannya Addendum tersebut sebagaimana yang dimaksud pasal 16 ada kewajiban yang tidak terpenuhi dalam addendum tersebut dinyatakan batal dan tidak berlaku, ada yang sepenuhnya yang dilakukan, ada sebagian kecil yang belum dilengkapi, dianggap tidak memenuhi unsur pada pasal 16.</li> </ul>	1.	2.	<p>3. Bahwa pada tahun 1997 Perjanjian kerja sama bersyarat Antara PT.KIK dengan Pemerintah Kota Madya Ujung Pandang tentang pembangunan dan pengelolaan terminal Daya Regional angkutan Darat;</p> <p>4. Dalam pelayanan public non retribusi PAD PD Terminal Metro pada posisi pelayanan terminal dan bisnis sewa lahan dan bangunan selama ini tidak diterapkan karena masih menunggu berakhirnya kerja sama pemerintah Kota Makassar dan PT.KIK</p> <p>5. PT KIK. Melakukan rapat dengan pihak yang telah melakukan protes untuk menyelesaikan; permasalahan yang terjadi, sebelumnya memutuskan Hubungan Krja sama, walau disisi lain telah selesai</p> <p>6. Tidak boleh diserahkan karena ada kewajiban-kewajiban/atau apa saja itu yang belum selesai yang belum diap[ahami oleh PT. KIK yang merupakan bagian dari kewajiban PT. KIK sebelum mereka melepas.</p>
---	-------------------	---	----	----	---

7	29 Mei 2023.	Rapat tentang Kejelasan status tanah UPT SD Inpres Mallengkeri I Makassar.	Surat Masuk UPTSPF SDI Mallengkeri I No: 421.1/028/UPTSPFSDI.M.1/V/2023 Perihal Konfirmasi status tanah sekolah tgl. 17 Mei 2023.	UPT SPF SDI Mallengkeri I Kota Makassar Kel. Mangasa Kec. Tamalate.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tugas Dinas Pendidikan menyurat ke BPN untuk meminta foto copy sertipikat dan surat yang ditandatangani oleh WaliKota</li> <li>2. Dokumen yang dibutuhkan oleh pencatat aset berupa pencatatan bahwa SDI Mallengkeri I dan II beserta tanahnya adalah tersebut sebagai aset sejak Tahun 1977;</li> <li>3. Sertipikat Hak Milik No. 417 Tahun 1979 pengganti SHM No. 20929 Tahun 2006.</li> </ol>	Sementara berproses dan menunggu rapat selanjutnya.
8	30 Mei 2023,	tentang kejelasan lahan tanah yang berada di jalan Pengayoman (di belakan kantor Mahkamah Militer/ Otmil Makassar STIA LAN) Kota Makassar.	Surat masuk Ahli Sdr Mustamin (ahli waris alm. Hj. Raside bin Manangnga).	Belakang kantor Mahkamah Militer (MAHMIL)/Otmil Makassar dan STIA LAN Makassar.	Menunggu surat dari BPKAD bahwa lahan tersebut.	
9	Tgl 7 Juni 2023,	<p>Rapat Koordinasi terkait Status lahan Mesjid Nurul Muhajirin, Kel. Kassi-Kassi. Kec. Rappocini, Kota Makassar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pihak Yayasan Mesjid Nurul Muhajirin berencana untuk mensertipikatkan Tanah lokasi Mesjid melalui Departemen Agama cq. KUA Kecamatan Rappocini;</li> <li>• Pihak Perumnas telah memberikan Klarifikasi bahwa tanah tersebut telah diserahkan ke Pemerintah Kota Makassar dimana tanah itu menyatu dengan Sekolah, ( Dok. Penyerahan dari Perumnas);</li> <li>• Pihak BPKAD menginformasikan tanah sudah tercatat sebagai aset pemerintah Kota Makassar (tercatat di KIB A).</li> </ul>	Aduan dan laporan dari Camat Rappocini dan Lurah Kassi-Kassi.	Jalan Asam Karanji no. 204 Kel. Kassi-Kassi Kec. Rappocini Makassar.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mesjid merupakan bagian dari Fsum yang telah diserahkan oleh Perumnas maka Ini menjadi milik Pemeintah Kota yang harus tercatat di BPKAD;</li> <li>2. Karena Pengukurannya belum pas maka kami meminta BPN untuk mengukur ulang;</li> <li>3. Pembuatan Sertipikat An. PEMKOT bukan pemilik Yayasan Mesjid;</li> <li>4. Rapat berikutnya baiknya dihadiri DEPAG dan BPN agar tidak terkait kekeliruan dalam pembuatan Sertipikat An. Mesjid yang ada di Kota Makassar.</li> </ol>	Sementara berproses dan menunggu rapat selanjutnya.



### 3. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah untuk Pembangunan

Pada program ini dilaksanakan kegiatan Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan adalah : Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota dan sub kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota adalah. Realisasi anggaran adalah Rp.70.350.000,- atau 20,12 % dari pagu anggaran 349.598.000,-

Untuk menghitung realisasi indikator outcome yaitu Persentase koordinasi penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh pemerintah daerah yang terlaksana, dihitung dengan cara :

$$\frac{\text{Jumlah penyelesai ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang terlaksana}}{\text{Jumlah dokumen ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang masuk}} \times 100\%$$

Pada Sub kegiatan Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah telah dilakukan peninjauan lapangan atas permasalahan pengadaan tanah di jalan Gatot Subroto kecamatan tallo kota makassar. Adapun penyerapan anggaran yang belum maksimal dikarenakan sampai saat ini masih terdapat beberapa lokasi yang menuntut untuk dilakukan pembayaran ganti rugi namun belum sampai pada tahapan peninjauan lokasi. Saat ini permasalahan tersebut masih dikaji dan baru pada tahap akan dilakukan rapat koordinasi.

Pada Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, masih ada beberapa kegiatan sosialisasi terkait dengan ganti kerugian dan santunan tanah yang baru akan dilaksanakan pada semester II ini sehingga mempengaruhi penyerapan anggaran yang belum maksimal.

Dihitung dengan cara :

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah koordinasi ganti kerugian tanah}}{\text{Target koordinasi ganti kerugian}} \times 100\% \\ &= \frac{5}{5} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

### 4. Program Penatagunaan Tanah

Pada program Penatagunaan tanah telah dilaksanakan kegiatan Penggunaan tanah hamparannya dalam satu daerah Kabupaten/Kota pada sub kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah pemanfaatan tanah negara dimana telah dilakukan pengamanan fisik terhadap asset tanah pemerintah berupa kegiatan pemasangan patok batas-batas tanah pemerintah

Kota, Pemagaran tanah asset Pemerintah Kota, Pemasangan papan bicara atas tanah asset Pemerintah Kota dilaksanakan. Kegiatan ini telah rampung dilaksanakan dan telah dilakukan serah terima hasil pekerjaan sebanyak 58 titik terdiri dari 58 titik papan bicara. Realisasi anggaran senilai Rp.682.530.710,- atau % dari nilai pagu sebesar Rp. 4.106.776.100,-.

Untuk kegiatan Pemagaran sampai dengan triwulan ke II masih pada tahap pengajuan perubahan RUP karena terkendala pencairan melalui pengadaan langsung di ubah ke E Purchasing . Kemudian untuk kegiatan pemasangan patok- patok batas-batas tanah pemerintah kota sampai dengan Triwulan ke II sudah sampai ketahap verifikasi berkas penawaran.

Kegiatan pemasangan papan bicara juga telah dilaksanakan pada semester I dan II tahun 2023 dan pekerjaan telah rampung 100 % dengan terpasangnya papan bicara pada tanah pemerintah Kota Makassar, sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 3.3  
Lokasi Pemasangan Papan Bicara TA 2022 pada Asset Tanah Pemerintah

NO.	LOKASI	ALAMAT	KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH
<b>PAPAN BICARA BESAR</b>					
1	MASJID AL-FURQAN	JL. MINASA UPA BLOK N	RAPPOCINI	MINASAUPA	1
2	KANTOR LURAH MINASA UPA	JL. MINASA UPA	RAPPOCINI	MINASAUPA	1
3	TAMAN MACAN	JL. SLAMET RIYADI	UJUNG PANDANG	BARU	1
4	LAPANGAN OLAHRAGA PAI	JL. TAMAN SUDIANG	BIRINGKANAYA	PAI	1
5	TAMAN PUJA SERAH	JL. TAMALANREA JAYA	TAMALANREA	TAMALANREA	1
6	LAPANGAN BTP	JL. TAMALANREA JAYA	TAMALANREA	BUNTUSU	1
7	MASJID AL-MUAMALAH & LAPANGAN	JL. KEJAYAAN UTARA 7 (BTP)	TAMALANREA	TAMALANREA	1
8	PERUMNAS BTP	PERUMNAS BTP BLOK M	TAMALANREA	TAMALANREA	1
<b>PAPAN BICARA KECIL</b>					
1	LORONG WISATA CARAKDEK	JL. R. TIMOR LR. 253	WAJO	ENDE	1
2	LORONG WISATA MAGENTA	JL. SANGIR LR.218	WAJO	MELAYU BARU	1
3	LORONG WISATA SOLATA-SHENTHEN	JL. GUNUNG BULUSARAUNG	WAJO	PATTUNUANG	1

4	LORONG WISATA BERGEN	JL. MANUNGGAL 22	UJUNG PANDANG	PISANG UTARA	1
5	LORONG WISATA AMSTRADRAM	JL. URIP SUMOHARDJO LR.79	MAKASSAR	MACCINI	1
6	LORONG WISATA LARVIK	JL. WR. SUPRATMAN	UJUNG PANDANG	BULOGADING	1
7	LORONG WISATA LYNGBY-TAABAEKA	JL. DATUK MUSENG LR. 32/2	UJUNG PANDANG	LOSARI	1
8	LORONG WISATA EMMEN	JL. SUNGAI SADDANG BARU LR. 3	MAKASSAR	BARA-BARAYA SELATAN	1
9	LORONG WISATA NIJMEGEN	JL. KESATUAN / KEBANGKITAN I	MAKASSAR	MACCINI PARANG	1
10	LORONG WISATA ANGGREK	JL. BADAK IV	MAMAJANG	BONTOBIRAENG	1
11	LORONG WISATA JERSAY	JL. PAJONGA DG. NGALLE III	MAMAJANG	PA'BATANG	1
12	LORONG WISATA SIPAKAINGA I	JL. VETERAN SELATAN	MAMAJANG	MANDALA	1
13	LORONG WISATA LISBON	JL. COKONURI	RAPPOCINI	GUNUNG SARI	1
14	LORONG WISATA MARIENPLATS	JL. DAHLIA	MARISO	MATTOANGING	1
15	LORONG WISATA AL-ASYIFAH	JL. MANUNGGAL 22	TAMALATE	MACCINI SOMBALA	1
16	LORONG WISATA VERA CRUZ BLODUL	JL. BONTO DAENG NGIRATE BLOK 20	RAPPOCINI	BONTO MAKKIO	1
17	LORONG WISATA SAGA	JL. DG. TATA III	TAMALATE	PARANG TAMBUNG	1
18	LORONG WISATA INDIANA POLIS	JL. BAJI ATI I	MAMAJANG	BAJIMAPPAKASUNGGU	1

19	LORONG WISATA BALLANG PARANG	JL. SUNGAI SADDANG BARU	RAPPOCINI	BALLAPARANG	1
20	LORONG WISATA MAKSUYUYAMA	JL. ANDI TONRO DALAM	TAMALATE	BONTODURI	1
21	LORONG WISATA LEEUWARDEN	JL. ABU BAKAR LAMBOGO LR. V	MAKASSAR	BARA-BARAYA	1
22	LORONG WISATA A. SIAGANG	JL. BONTO LANDRA LR. 3	MAKASSAR	BANTA-BANTAENG	1
23	LORONG WISATA ANSAN	JL. KANDEA III LR. 10	TALLO	BUNGAEJAYA	1
24	LORONG WISATA BUCHEON	JL. KANDEA III LR. V	TALLO	BUNGAEJAYA	1
25	LORONG WISATA JEONJU	JL. TEUKU UMAR 1A	TALLO	SUANGGA	1
26	LORONG WISATA CHEONG WA DAE	JL. TEUKU UMAR 10 LR. IV	TALLO	KALUKUBODOA	1
27	LORONG WISATA JINHAЕ	JL. GALANGAN KAPAL BELAKANG	TALLO	KALUKUBODOA	1
28	LORONG WISATA TEDUH	JL. KELAPA TIGA LR. I	PANAKUKKANG	MASALE	1
29	LORONG WISATA CANBERRA	JL. AP. PETTARANI 5 RT 02/03	PANAKUKKANG	TAMAMAUNG	1
30	LORONG WISATA GYIMPIE	JL. AP. PETTARANI 5 RT 01/02	PANAKUKKANG	TAMAMAUNG	1
31	LORONG WISATA SAKURA	JL. SARAPPO LR. 305	WAJO	MAMPU	1
32	LORONG WISATA IMOLA	JL. SABUTUNG BUNTU BARAT LR. 177	UJUNG TANAH	TAMALABBA	1
33	LORONG WISATA PARMA	JL. PONDOK KASIH IBU II	UJUNG TANAH	CAMBA BERU	1

34	LORONG WISATA VICENZA	JL. YOS SUDARSO 2 LR. 154 A	UJUNG TANAH	TABARINGAN	1
35	LORONG WISATA LORTA	JL. ABD. DAENG SIRUA NO.34B	PANAKUKKANG	TELLO BARU	1
36	LORONG WISATA LOSMORE	JL. ANGKASA I LR. 2	PANAKUKKANG	PANAİKANG	1
37	LORONG WISATA VOLTKESTWIL	JL. KERUKURANAN RAYA TIMUR (BTP BLOK H LAMA)	TAMALANREA	BUNTUSU	1
38	LORONG WISATA BORITTA / ECCLES	JL. UJUNG BORILAMA RT.03 RW.03	MANGGALA	BITOWA	1
39	LORONG WISATA JAHE / AIDEN	JL. BANGKALA DALAM 19	MANGGALA	BIRING ROMANG	1
40	LORONG WISATA TAMAN BERMAIN ANAK-ANAK	PERUM. NUSA HARAPAN PERMAI BLOK E RT.04 RW.02	BIRINGKANAYA	KATIMBANG	1
41	LORONG WISATA TRITURA	JL. TRITURA	MANGGALA	BANGKALA	1
42	LORONG WISATA PUCUK ORANGE / NOTTONGHAM	JL. NIPA-NIPA DALAM 5	MANGGALA	MANGGALA	1
43	LORONG WISATA TURINGOWA	JL. ANCE DG. NGOYO	PANAKUKKANG	MASALE	1
44	FASUM FASOS PASAR	JL. TANJUNG BUNGA	MAMAJANG	SAMBUNG JAWA	1
45	LORONG WISATA CORDOBA	JL. SATANGNGA	BONTOALA	BONTOALA PARANG	1
46	LORONG WISATA VILLENA	JL. TINUMBU LR.132 J	BONTOALA	LAYANG	1
47	LORONG WISATA CANTABRIA	JL. BANDANG 3	BONTOALA	PARANG LAYANG	1
48	LORONG WISATA ASTURIAS	JL. YOS SUDARSO	BONTOALA	BONTOALA	1

49	LORONG WISATA MINNEA POLIS	JL. SERIGALA	MAMAJANG	MAMAJANG DALAM	1
50	SMP NEGERI 23 MAKASSAR	JL. PACCINANG RAYA NO. 35	PANAKUKKANG	TELLO BARU	1
<b>JUMLAH</b>					<b>58</b>





Dalam program penatagunaan tanah dilaksanakan kegiatan Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah kabupaten Kota dengan sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah Indikator kinerja sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah adalah jumlah sosialisasi tata cara pelepasan tanah exgemente juga sementara dalam proses pelaksanaan kegiatan.
- Pada sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah kabupaten/kota pada rekening belanja modala yaitu pemasangan patok batas batas tanah pemerintah juga masih dalam proses tender.
- Sub Kegiatan Pemetaan zona nilai tanah kewenangan kabupaten Kota Pada sub kegiatan ini dilaksanakan telah menargetkan 85 Bidang dan telah mengajukan 22 berkas aset tanah Pemerintah Kota Makassar untuk disertifikatkan ke BPN Kota Makassar. Dari 85 berkas yang telah diajukan tersebut, ada 17 sertifikat telah, 7 berkas sementara proses pemberian hak. Adapun data sertifikat yang telah terbit di tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.5

## DATA ASSET PEMERINTAH KOTA MAKASSAR YANG TELAH TERBIT SERTIFIKAT TAHUN 2023

NO	NAMA/PERUNTUKAN	KECAMATAN	KELURAHAN	LUAS(M <sup>2</sup> )	NO.SHM	TAHUN	KETERANGAN
1	SD Negeri Maaradekaya 1 dan 2	Tamalate	Maradekaya Utara	1.540	20.01.03.10.4.20005	2023	Sertipikat di BPKAD
2	SD Inpres Tangkala II	Biringkanaya	Laikang	2.246	20.21.11.11.4.00001	2023	Sertipikat di BPKAD
3	SD Negeri Cenderawasih	Mamajang	Tamparan Keke	2.442	20.01.02.11.4.20003	2023	Sertipikat di BPKAD
4	Taman Macan	Ujung Pandang	Bulogading	10.415	20.01.04.06.4.20010	2023	Sertipikat di BPKAD
5	SD Inpres Bertingkat Bara- Baraya II	Makassar	Bara- Baraya Timur	1.926	20.01.03.08.4.20002	2023	Sertipikat di BPKAD
6	SD Inpres Tamalanrea IV	Tamalanrea	Buntusu	2.356	20.01.14.07.4.00002	2023	Sertipikat di BPKAD
7	Sarana Olahrag	Tamalanrea	Buntusu	14.300	20.01.14.07.4.0001	2023	Sertipikat di BPKAD
8	DINAS Pendidikan	Panakkukang	Paropo	3.990	20.01.09.08.4.20007	2023	Sertipikat MASIH DI BPN
9	Lurah Paropo	Panakkukang	Paropo	257	20.01.09.08.4.20006	2023	Sertipikat MASIH DI BPN
10	SD Negeri Mangasa	Rappocini	Minasa Upa	3.015	20.01.13.12.4.0008	2023	Sertipikat MASIH DI BPN
11	SDN KIP Bara- Baraya 1	Makassar	Bara-Baraya	2.044	20.01,03,02,4,20003	2023	Sertipikat MASIH DI BPN
12	SD Negeri Jongaya	Tamalate	Jongaya	1,725	20,01,10,09,4,20021	2023	Sertipikat MASIH DI BPN
13	SD Inpres Cambaya I	Ujung Tanah	Camba Berua	2,025	20,01,08,11,4,20003	2023	Sertipikat MASIH DI BPN

14	SMP Negeri 48	Rappocini	Tidung	1,0698	20,01,13,10,4,20030	2023	Sertipikat MASIH DI BPN
15	SDN BTN Pemda	Rappocini	Tidung	3,072	20,01,13,10,4,20031	2023	Sertipikat MASIH DI BPN
16	Puskesmas Pampang	Pamakkukang	Pampang	541	20,01,09,07,4,20037	2023	Sertipikat MASIH DI BPN
17	SD Inpres Batu Laccu	Panakkukang	Pandang	911	20,01,09,07,4,20037	2023	Sertipikat MASIH DI BPN

Indikator kinerja program adalah Persentase Aset Tanah Pemerintah Kota Yang Disertifikatkan dihitung dengan cara :

$$\frac{\text{Jumlah aset tanah yang telah disertifikatkan}}{\text{Jumlah seluruh aset tanah}} \times 100\%$$

Hingga tahun 2022 jumlah aset yang telah bersertifikat adalah 351 bidang, dan jumlah seluruh aset tanah non jalan adalah 877 bidang sehingga capaian program penatagunaan tanah hingga tahun 2021 sebagai berikut :

$$= \frac{357}{877} \times 100\% = 40,7\%$$

## B. PENYERAPAN DANA PROGRAM

Dinas Pertanahan Kota Makassar pada Tahun 2023 sesuai dengan rencana kerja perubahan sebagaimana yang telah dituangkan Renja Perubahan Dinas Pertanahan dalam DPA Perubahan-SKPD mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.16.909.681.226,-. Realisasi anggaran telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi yaitu sebesar Rp. 14.156.500.708,- atau dengan persentase 83,7% dengan rincian realisasi masing-masing program sebagai berikut :

Tabel 3.9  
Penyerapan Dana Program

No	Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5
	<b>BELANJA</b>	<b>12.972.301.000</b>	<b>3.862.811.564</b>	<b>29,78</b>
A	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>8.304.709.000</b>	<b>3.862.811.564</b>	<b>46,5%</b>
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	282.237.000	4.800.000	1,7

No	Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	139.024.500	4.800.000	3,5
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.023.500	0	0,0
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.350.000	0	0,0
	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	7.133.000	0	0,0
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	6.886.000	0	0,0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.889.000	0	0,0
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	107.931.000	0	0,0
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	3.655.798.000	1.360.913.420	37,2
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.956.952.300	1.030.450.778	34,8
	Penyedia Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	215.520.000	83.980.000	39,0
	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	126.000.000	63.000.000	50,0

No	Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5
	Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	30.123.000	0	0,0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.757.000	0	0,0
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/ Triwulan/ semesteran SKPD	323.445.800	183.482.642	56,7
	<b>Administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah</b>	544.479.200	181.012.247	33,2
	Penatausahaan Barang milik daerah pada SKPD	338.008.200	123.442.248	36,5
	Pemanfaatan Barang milik daerah	206.471.000	57.569.999	27,9
	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat daerah</b>	615.578.400	121.242.248	19,7
	Analisa dan pengembangan Retribusi Daerah serta penyusunan Kebijakan retribusi daerah	308.911.000	0	0,0
	Penyuluhan dan penyeberluasan Kebijakan retribusi daerah	107.585.000	26.360.000	24,5
	Pendataan dan pendaftaran objek Retribusi	201.082.400	94.882.248	47,2
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	2.032.050.000	1.135.500.000	55,9
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	32.850.000	0	0,0

No	Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	30.484.000	0	0,0
	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	93.716.000	0	0,0
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.875.000.000	1.135.500.000	60,6
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>739.686.300</b>	228.979.449	31,0
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.646.300	0	0,0
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.646.300	0	0,0
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	47.108.600	20.228.000	42,9
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49.906.000	0	0,0
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	327.600.000	68.380.000	20,9
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	252.000.000	127.371.449	50,5
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	52.000.000	13.000.000	25,0
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	178.730.000	0	0,0
	Pengadaan Mebel	6.690.000	0	0,0
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	172.040.000	0	0,0

No	Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>52.970.000</b>	<b>3.596.340</b>	<b>6,8</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	29.770.000	0	0,0
	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.200.000	3.596.340	15,5
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>203.180.000</b>	<b>65.217.150</b>	<b>32,1</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	52.130.000	14.008.150	26,9
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	103.560.000	37.209.000	35,9
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.490.000	14.000.000	49,1
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	-	-	-
<b>C</b>	<b>Program Penyelesaian Sengketa Tanah</b>	<b>211.217.900</b>	<b>8.670.000</b>	<b>4,1</b>
	Inventarisasi Sengketa , Konflik dan Perkara pertanahan dala 1 daerah Kabupaten Kota	169.398.000	0	0,0
	Mediasi Penyelesaian sengketa tanah yang di mediasi	41.819.900	8.670.000	20,7



No	Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5
<b>D</b>	<b>Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan</b>	349.598.000	70.350.000	20,1
	<b>Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	349.598.000	70.350.000	20,1
	Penetapan Daftar msyarakat Penerima Santunan Tanah dalam satu daerah Kabupaten/ Kota	144.005.500	0	0,0
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah ganti Kerugian dan santunan tanah untuk Pembangunan Oleh pemerintah Daerah Kabupaten Kota	205.592.500	70.350.000	34,2
<b>E</b>	<b>Program Penatagunaan Tanah</b>	<b>4.106.776.100</b>	<b>682.530.710</b>	16,6
	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah	114.428.500	36.100.000	31,5
	Koordinasi Pemetaan Zona nilai tanah kewenangan Kabupaten Kota	682.899.600	19.900.000	2,9
	Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan Konsolidasi Tanah kabupaten / Kota	3.309.448.000	626.530.710	18,9

## **BAB IV**

### **KENDALA YANG DIHADAPI**

#### **1. Program Pengelolaan Izin Lokasi**

Dalam program kegiatan pengelolaan izin lokasi tidak dapat dijalankan diakibatkan oleh karena izin lokasi bukan lagi menjadi kewenangan kabupaten kota dan sudah menjadi kewenangan pusat berdasarkan UUD cipta kerja.

#### **2. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan**

Beberapa permasalahan yang di mediasi belum sampai pada titik penyelesaian dikarenakan beberapa hal yaitu :

##### **Faktor Pendorong:**

- Koordinasi yang baik antara kedua belah pihak yang bersengketa yang diwujudkan dalam bentuk rapat koordinasi yang difasilitasi oleh Dinas Pertanahan yang mewakili pemerintah kota makassar dan dihadiri oleh berbagai instansi terkait maupun instansi vertikal.
- Terciptanya pelayanan yang baik oleh dinas pertanahan dalam bentuk mediasi antara pihak yang bersengketa.

##### **Tindak Lanjut :**

- Melakukan rapat koordinasi
- Melakukan mediasi dan penerimaan pengaduan permohonan atas permasalahan sengketa tanah.

#### **3. Program Penatagunaan Tanah**

Dalam program penatagunaan tanah dilaksanakan kegiatan pensertifikatan tanah asset Pemerintah Kota. Dinas Pertanahan pada tahun 2023 menargetkan 85 Bidang dan telah mengajukan 44 berkas aset tanah Pemerintah Kota Makassar untuk disertifikatkan ke BPN Kota Makassar. Dari 85 berkas yang telah diajukan tersebut, sudah terbit sebanyak 10 bidang sertifikat.

Adapun kendala tidak tercapainya target sertifikasi 85 bidang tersebut adalah :

##### **Faktor Penghambat:**

- Kurangnya dukungan dari stakeholder terkait;
- SDM yang kurang memadai;
- Sistem dan regulasi yang selalu berubah – ubah.

##### **Tindak Lanjut:**

- Telah melakukan koordinasi pada pihak terkait;
- Perekrutan pegawai yang ahli dalam bidangnya.
- Akan melaksanakan Focus Discussion Group untuk mengumpulkan informasi terkait kendala yang dihadapi dalam mensertifikatkan asset dan mencari solusi bersama percepatan pensertifikatan asset pemerintah.

#### **4. program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan**

Sebagaimana tercantum dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 untuk program pengadaan lahan tidak ada kewenangan Pemerintah Kabupaten Kota, maka untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Kota Makassar akan ketersediaan lahan untuk pembangunan maka SKPD yang membutuhkan lahan menganggarkan pembelian lahan dan dapat melakukan pengadaan langsung untuk kebutuhan lahan dibawah 5 Ha. Sebagai SKPD yang melakukan supervisi terhadap pengadaan langsung lahan pada SKPD yang membutuhkan lahan maka Dinas Pertanahan melaksanakan program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.

Dalam menentukan kinerja outcome dari program ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan dimana indikator program adalah Persentase penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh pemerintah daerah yang terlaksana, dan penganggaran serta pelaksanaan pengadaan lahan secara langsung ada pada SKPD yang membutuhkan lahan maka capaian kinerja program merupakan hasil dari kerja tim beberapa instansi yang terlibat dalam proses pengadaan lahan.

Adapun faktor kendala, pendorong dan rencana aksi yang akan dilakukan kedepannya adalah :

**Kendala :**

- SKPD yang membutuhkan lahan belum memahami sepenuhnya prosedur pengadaan lahan.

**Faktor Pendorong :**

- Peraturan pengadaan lahan sudah tersedia
- Koordinasi yang intensif dan komitmen antar SKPD, dan stakeholder yang terlibat dalam pengadaan lahan

**Rencana Aksi :**

- Melaksanakan bimbingan/sosialisasi tata cara pengadaan lahan dan peraturan terkait pengadaan lahan
- Bepartispasi aktif melakukan supervisi terhadap SKPD yang melaksanakan pengadaan lahan.
- Melakukan pendampingan dalam proses pengadaan tanah kepada SKPD terkait, mulai dari tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pelepasan hak (pembayaran ganti rugi).

## **BAB V PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Evaluasi Rencana kerja Dinas Pertanahan Kota Makassar merupakan pedoman dalam mengevaluasi program dan kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan di tahun 2023. Evaluasi ini disusun tetap berpedoman dengan segala bentuk laporan evaluasi dan monitoring selama tahun berjalan, laporan ini juga disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Pertanahan Kota Makassar berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan pada tahun 2023 dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Berikut uraian persentase rasio capaian kinerja Dinas Pertanahan Kota Makassar semester II ;

1. Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dengan target 90 % dan capaian 89 %
2. Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah dengan target 100% dan capaian 95%
3. Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan dengan target 90 % dan capaian 92%.
4. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan pada Renja perubahan target dinolkan dikarenakan izin lokasi bukan lagi menjadi kewenangan dinas pertanahan .
5. Persentase Penanganan Sengketa Tanah Garapan Yang Dilakukan Melalui Mediasi dengan target 12 mediasi dan capaian 12 mediasi atau 100%
6. Persentase koordinasi ganti kerugian dan santunan tanah yang terlaksana dengan target 5 lokasi dan capaian 5 lokasi atau 100%
7. Persentase tanah asset pemerintah yang diamankan melalui kegiatan pengamanan fisik dengan target 40 % atau 105 titik dan capaian 100% atau 114 titik
8. Persentase tanah asset pemerintah yang disertifikatkan dengan target 40 % dan capaian 40,7% atau 52 sertifikat yang telah terbit yang 7 diantaranya merupakan usulan dari tahun 2021.

### **B. REKOMENDASI**

Langkah-langkah kedepan yang akan dilaksanakan Dinas Pertanahan Kota Makassar:

1. Penguatan koordinasi antar instansi, institusi dan stakeholder terkait
2. Perlunya peningkatan kapasitas pegawai pada Dinas Pertanahan Kota Makassar
3. Perlunya penguatan dan penertiban administrasi Pertanahan terhadap asset tanah Pemerintah Kota

Demikian Laporan Evaluasi Renja Tahun 2023 Dinas Pertanahan Kota Makassar yang dapat disajikan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksana tugas dan fungsi serta kinerja yang telah dicapai berdasarkan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku, semoga laporan evaluasi yang disusun dalam Laporan ini memberikan manfaat dan menjadi acuan perencanaan pembangunan selanjutnya.





